

**PENERAPAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sosial Jurusan PMI Kons Kesejahteraan Sosial  
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MAKMUR PRIYANTO**

**NIM: 50300112048**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmur Priyanto  
NIM : 50300112048  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 17 April 1994  
Jur/Prodi/Konsentrasi : PMI Kons. Kesejahteraan Sosial  
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Jalan Kumala II Lorong III No.15/17  
Judul : Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 April 2016

Penyusun,

**MAKMUR PRIYANTO**  
**NIM: 50300112048**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, yang disusun oleh Makmur Priyanto, NIM: 50300112048, mahasiswa Jurusan PMI Konsenterasi Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 M, bertepatan dengan 27 Rajab 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, Jurusan PMI Konsenterasi Kesejahteraan Sosial (dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 4 Mei 2016 M.  
27 Rajab 1437 H.

## **DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Dra. St.Aisyah BM, M.Sos.I	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syamsuddin AB, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syamsuddin AB, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Baharuddin Ali, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Nuryadi Kadir, S.Sos.,MA	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar,

**Dr. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd., M.Si.,MM**  
**NIP. 19690827 199603 1 004**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga limpahan rahmat dan hidayah-Nya selalu menyertai kita. *Innallaha wa malaaiakahu yushalluna 'alannabiy, yaa ayyuhalladzina amanu shallu alayhi washalimu tasliman.* Semoga shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad saw, bershalawat kepadanya menjadi ungkapan terima kasih dan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad saw. Atas perjuangannya, sehingga nikmat Islam masih dapat kita rasakan sampai saat ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah terkhusus kementerian sosial dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mengakses pelayanan pada komponen kesehatan dan pendidikan.

Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Wakil Rektor I, II, III, IV beserta seluruh staf dan karyawan.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd.,M.Si.,M.M selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Misbahuddin, M.Ag selaku Pembantu Dekan I, Dr. H. Mahmuddin, M.Ag selaku Pembantu Dekan II, Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I selaku Pembantu Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

4. Dra. St. Aisyah BM., M.Sos.I selaku Ketua Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial dan Dr. Syamsuddin AB, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
5. Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag selaku Pembimbing I dan Nuryadi Kadir S.Sos.,MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Nur Syamsiah M.Pd.I Selaku Penguji I dan Dr. Syamsuddin AB, M.Pd Selaku Penguji II yang telah banyak memeberikan koreksi, saran, masukan dan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi
7. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar terima kasih atas bantuan dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah.
8. Saudara-saudaraku tercinta Muh.Munir Majid, Muh.Mansyur Majid,Muh Haidir Majid dan Muh Aprianto Majid yang selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Teruslah belajar dan beribadah serta raihlah kecintaan Allah swt.
9. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan kepala perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta karyawan, atas ketulusan dan kesabarannya membantu penulis untuk memberikan pelayanan dalam mengumpulkan data-data.
10. Kepada kedua orang tua, ayahanda Abd.Majid dan ibunda Syamsia tercinta, hanya luapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan atas setiap tetes keringat dan air mata. Dengan penuh kasih sayang, pengertian dan iringan doa telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga menjadi manusia yang lebih dewasa.

11. Teman-teman jurusan PMI Konsenterasi Kesejahteraan Sosial, dan teman-teman seperjuang KKN Kebangsaan, kehadiran kalian sangat berharga dalam hidup penulis, terutama saat penulis menyusun karya sederhana ini. Hanya kata terima kasih yang menjadi medali emas sebagai persembahan untuk kalian, jadilah hamba Allah yang mencintai dan dicintai.

Harapan penulis semoga doa dan nasehat tetap ada dalam hati, menjadi mata air penyenjuk, sehingga tetap *istiqomah* dijalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

***Wassalam***

Makassar, 4 April 2016  
Penulis

**MAKMUR PRIYANTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>12-27</b>
A. Tinjauan Program keluarga Harapan.....	12
B. Tinjauan Hirarki Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
C. Tinjauan Kemiskinan.....	17
D. Tinjauan Sumber Daya Manusia (SDM).....	21
E. Pandangan Islam Tentang Program Keluarga Harapan.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28-33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34-64</b>
A. Profil Kecamatan Tamalate dan Profil PKH .....	34
B. Penerapan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial.....	48
C. Kendala yang dihadapi PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	53
D. Upaya yang dilakukan PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	56
E. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65-66</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Implikasi Penelitian .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Relevan Terdahulu .....	6
Tabel 3.1 Nama-nama informan dalam penelitian.....	31
Tabel 4.1 Luas dan ketinggian dari permukaan laut di kecamatan Tamalate .....	35
Tabel 4.2 Jumlah penduduk laki-laki, perempuan, KK, RT, RW dan Wajib KTP .....	44
Tabel 4.3 :Penduduk menurut agama/aliran kepercayaan di kecamatan Tamalate .....	45
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Tamalate TA 2013/2014 .....	46
Tabel 4.5 Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH )2015 .....	47
Tabel 4.6 Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Jumlah Bantuan Tahun 2010-2015 .....	48
Tabel 4.7 Rincian Dana PEMDA dalam Meningkatkan Kualitas SDM.....	50
Tabel 4.8 Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahap 2016.....	58

## ABSTRAK

**Nama : Makmur Priyanto**

**Nim : 50300112048**

**Judul :Penerapan Prgoram Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

---

Skripsi ini adalah Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualatias sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan peneliti, yaitu: 1) Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar ?,2) Bagaimana upaya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar ?,3) Bagaimana kendala dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Pendamping, koordinator dan penerima bantuan program keluarga harapan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan PKH dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang ada dan tindakan yang diperlukan serta menyelesaikan masalah yang muncul pada tingkat penangan terdekat. 2) keberhasilan PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan merubah perilaku/pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 3) Peningkatan Kualitas SDM dalam 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sikap/pola pikir (*Mindset*)

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Harapan kepada pemerintah, agar PKH ini kedepanya dapat menambah bantuan dan melanjutkan kejenjang SMA bahkan kejenjang perguruan tinggi tidak hanya sebatas SMP, karena biaya pendidikan semakin besar dan beban Keluarga Sangat Miskin (KSM) dapat diminimalisir. Sebagaimana hal ini di harapkan sebagian besar responden. 2) Dengan berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) ke depannya, maka diharapkan kepada pemerintah khususnya kementerian sosial menambah pendamping dan operator agar mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Maka sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang di kenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) bukan kelanjutan program bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di berikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin, mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak(BBM), Program Keluarga Harapan (PKH) lebih di maksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin<sup>1</sup>. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain,program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan Kronis.

Islam mengajarkan bagaimana manusia harus mencapai Kesejahteraan, Keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam firman Allah QS.Al-Isra/17: 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah kepada kerabat yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Bachtiar Chamsyah dan Mu'mang Nuryana, *Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia: Dimensi Religi dalam kesejahteraan Sosial* (Cet, Jakarta : Balatbang Depsos,2003), h. 9.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra,2010),h.428.

Sejalan dengan perkembangan kota, khususnya Makassar yang menuju kota dunia, menjadi sebuah daya tarik yang kuat yang dapat menjanjikan berbagai harapan dan berbagai macam tujuan, sehingga salah satu akibatnya munculnya dampak sosial diantaranya urbanisasi yang dapat memacu pertumbuhan populasi komunitas masyarakat marginal yang semakin pesat, maka kota Makassar mau tidak mau akan diperhadapkan pada berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks yang mengakibatkan sebagian anggota masyarakat baik perorangan, keluarga, maupun kelompok tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar, berdampak pada pengangguran dan kemiskinan

Berdasarkan observasi awal, KK yang menerima bantuan setiap kelurahan, Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate kota Makassar tahun 2012 adalah kelurahan Mangasa sebanyak 104 KK, kelurahan Manuruki 10 KK, kelurahan Pa'baeng-baeng 190 KK, kelurahan Bongaya 39 KK, kelurahan Jongaya 67 KK, kelurahan Balang Baru 171 KK, kelurahan Maccini Sombala 196 KK, kelurahan Parang Tambung 429 KK, kelurahan Barombong 260 KK, dan kelurahan Tanjung merdeka 70 KK. Jadi jumlah keseluruhan penerima bantuan PKH di kecamatan Tamalate kota Makassar sebanyak 1.530 KK dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).<sup>3</sup>

Melihat dari jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) cukup signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga miskin. Program kebijakan daerah maupun pusat mewajibkan, wajib belajar 9 tahun serta memutus mata rantai kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kebijakan jaminan sosial nasional.

---

<sup>3</sup>Profil, *Program Keluarga Harapan* Tahun 2012. h.18

Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sasaran atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga sehingga orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH. Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan.

Program ini sangat diperlukan untuk membangun masa depan anak yang sehat dan cerdas. Selain itu juga untuk mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan.

## ***B.Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di fokuskan mengarah kepada penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar

### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul di atas, dapat di deskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan, penulis mampu mendeskripsikan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu ,penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial di dalam tatanan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam komposisi dan gerakan sosial dan mekanisme penduduk. menentukan penduduk yang aktif secara ekonomi dari kelompok-kelompoknya dan juga untuk menentukan tingkat partisipasi penduduk yang aktif<sup>4</sup>
- b. Penerapan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan perekonomian sosial nasional terhadap program keluarga harapan, untuk menilai sumber-sumber tertentu, memberikan perhatian terhadap pengkombinasian yang rasional dalam periode perencanaan dan menentukan besar peningkatan sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar.

---

<sup>4</sup>Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berawal dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu”

Bagaimana penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

Adapun sub masalahnya adalah :

1. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar ?
2. Bagaimana upaya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar

### ***D. Kajian Pustaka***

Berdasarkan pada penelusuran kajian pustaka yang telah peneliti lakukan di beberapa riset dan *library*, ditemukan beberapa literatur yang relevan tapi berdeba objek penelitian yang akan dilakukan, diantaranya tabel di sebelah ini mendeskripsikan perbedaan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis :

Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Relevan Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Skripsi	Perbedaan Penelitian	
		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1.	Asty Respita, Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam mensosialisasikan program keluarga harapan terhadap rumah tangga sangat miskin di kecamatan Tamalate, Universitas Hasanuddin Makassar 2011	Strategi Komunikasi dalam pemutusan mata rantai kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Subjek penelitian adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
2.	Galih Aulia, Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) di dusun Bulurejo desa Monggol kecamatan Saptosari kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	proses implementasi PKH di masyarakat khususnya di Dusun Bulurejo melalui pemberdayaan masyarakat	Subjek penelitian adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
3.	Sri Lindawati, Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Keluarga (Studi Kasus desa Tegal Kecamatan Kemang kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat), Institut Pertanian Bogor, 2014	Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM	Subjek penelitian adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH)



4	Mardiah, Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga harapan (PKH) studi kasus terhadap masyarakat miskin di kecamatan Tamalate kota Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2012	Pemutusan mata rantai kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Subjek penelitian adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
---	--	--	--

*Sumber : Diolah 2016*

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda, baik dari persepsi kajian maupun dari segi metodologi, adapun perbedaanya sebagai berikut :

1. Melihat metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut mendeskripsikan strategi komunikasi yang direncanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar dilaksanakan melalui beberapa tahap sesuai teori strategi komunikasi seperti menentukan penerima manfaat, bagaimana menyusun pesan, menetapkan metode yang digunakan serta menyeleksi penggunaan media cetak maupun elektronik. Dimana strategi komunikasi yang telah terencana seperti sosialisasi, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di kecamatan yang didampingi oleh koordinator program keluarga harapan.
2. Perbedaan skripsi ini membahas tentang proses implementasi PKH di masyarakat khususnya di dusun Bulurejo sudah berjalan selama 7 Tahun proses bantuan PKH di salurkan kepada masyarakat yang telah di seleksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul dengan Kementerian Sosial RI kemudian menghasilkan data terkait dengan syarat-syarat masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berhak menerima bantuan PKH, jumlah Peserta PKH di dusun Bulurejo 17 RTSM, melihat dari hasil penelitian di atas proses implementasi mengarah kepada program tersebut selama kurang lebih 7 tahun, sedangkan penelitian yang akan di lakukan objek penelitian fokus kepada penerapan

program keluarga harapan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate, kota Makassar.

3. Skripsi mendeskripsikan mengenai Sebuah implementasi dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Skripsi tersebut menjelaskan, tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM., maka diperlukan adanya bentuk pemberdayaan terhadap RTSM penerima bantuan dengan melihat karakteristik rumah tangga, karena setiap rumah tangga pasti memiliki ciri dan kebutuhan yang berbeda sehingga disinilah peran institusi lokal yang perlu dilibatkan, misalnya peran pemerintah desa dan para perangkat desa yang mampu menggerakkan masyarakat melalui pemberdayaan.
4. Berdasarkan objek penelitian membahas tentang pemutusan mata rantai kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga ,status kesehatan,gizi ibu hamil dan anak di bawah usia 6 tahun serta program ini mendorong angka partisipasi pendidikan belajar 9 tahun, perbedaan mendasar objek penelitian fokus kepada program yang yang di capai oleh Program Keluarga Harapan, dan melihat kondisi kemiskinan masyarakat yang berdampak kepada putus sekolah dan kurang fasilitas pendukung dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan perbedaan di atas penulis, ingin mengetahui bagaimana ,upaya, kendala penerapan program keluarga harapan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar, apa program tersebut berjalan efisien dan dapat mengurangi angka kemiskinan di kota Makassar.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini sebagaimana dari perumusan masalah di halaman sebelumnya, dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar.
- b. Mengetahui upaya penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar.
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate kota Makassar

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai referensi dan tambahan informasi bagi perguruan tinggi khususnya jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan iptek para mahasiswa mengenai penerapan Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan Bangsa biasanya diidentikkan dengan sumber daya manusia.

Keberhasilan pembangunan selalu diukur dengan pencapaian dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, akibatnya muncul berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan perlu adanya pembangunan tandingan berupa pembangunan sosial. Pembangunan sosial tidak akan dijalankan tanpa adanya keterpaduan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial adalah proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan keadilan. Pembangunan sosial yang dilakukan ditujukan untuk dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

- 2) Sebagai pedoman penelitian kualitatif dalam aspek penerapan Program keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 3) Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan menambah wawasan dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

b. Kegunaan praktis

Mengetahui Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Pendidikan dan Kesehatan.

---

<sup>5</sup> Syakhrudin, "Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial", *Blog Syakhrudin*. <http://syakhrudin.com/2013/03/30/pembangunan-sosial-dan-kesejahteraan-sosial> (1 Februari 2016)

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas Program Keluarga Harapan (PKH) memfokuskan program tersebut, pendidikan yang meliputi anak usia 6-18 tahun yang putus sekolah dan sektor kesehatan bagi ibu hamil, nifas dan kesehatan kandungan, serta mendorong pemutusan anak putus sekolah, kesehatan ibu hamil dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam aspek perlindungan sosial.

---

<sup>6</sup>Andi Z.A Dulung, "*Sistem Pengaduan Masyarakat PKH*", (Cet, Jakarta: Mega Citra Pustaka) h. 4

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A.Tinjauan Program Keluarga Harapan***

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan masyarakat di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 akan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak di gulirkan pada tahun 2007, Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan bentuk baru program penanggulangan kemiskinan setelah sebelumnya ada program bernama PNPM, BLT, JPS, RASKIN dan Bentuk program penganggulungan kemiskinan lainnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Tahun 2009,Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material,spiritual dan sosial. Sehingga dapat hidup layak dan keberfungsiaan sosial.Negara terhadap kelompok lemah (Fakir Miskin dan Anak Terlantar) serta sistem jaminan sosoal.ini berarti,kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan sistem perekonomian dan sistem jaminan sosial di Indonesia.<sup>2</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.<sup>3</sup>

Pendamping Program Keluarga Harapan adalah pekerja sosial yang di rekrut oleh unit pengelola PKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk

---

<sup>1</sup>Edi Suharto,*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Cet. I ; Bandung: PT Refika Aditama,2005), h.8

<sup>2</sup>Sekretariat Negara” *Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial*

<sup>3</sup>Toto Utomo Budi Santoso,*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi I,Jakarta: Departemen Sosial,2009), h. 10

melaksanakan tugas Pendampingan RTSM penerimaan program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan PKH bersifat multisektor baik di pusat maupun daerah yang melibatkan instansi. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Guna menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli Program Keluarga Harapan (PKH) dan konsultan *World Bank*.<sup>5</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6

---

<sup>4</sup>Toto Budi Santoso, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi I, Jakarta: Departemen Sosial 2009), h. 13

<sup>5</sup>World Bank, 2005, *policy brief*. Lihat juga A.Syafi'i Ma'rif, Arzumadi Azra, dkk. *Islam, good governance, penentasan kemiskinan* (Jakarta: Ma'rif Institute bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2007), h. 21.

tahun dari RTSM. d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.<sup>6</sup>

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga sehingga orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan melaksanakan, yaitu:

- a. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib
- b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.

---

<sup>6</sup>Toto Utomo Budi Santoso, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi I, Jakarta: Departemen Sosial, 2009), h.12



- c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH dalam hal kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu sehingga kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya.

PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah. Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen

kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga.<sup>8</sup>

### **B. Tinjauan Hirarki Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Peran masing-masing :

1. UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.
2. UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kabupaten/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.
3. Pendamping program keluarga harapan merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima

---

<sup>8</sup>Toto Utomo Budi Santoso, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi I Jakarta: Departemen Sosial, 2009), h.28

manfaat langsung. Organisasi pendukung PKH, potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS), adalah :

- a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- b. Organisasi Sosial (Orsos)
- c. Karang Taruna (KT)
- d. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).<sup>9</sup>

### ***C.Tinjauan Kemiskinan***

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan.<sup>10</sup>

Kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi tersebut meliputi kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, misalnya kebutuhan konsumsi individu (Sandang, Pangan, dan papan) maupun keperluan pelayanan sosial (air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan). Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan kultural dan struktural.<sup>11</sup>

Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiakan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup>Toto Utomo Budi Santoso, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi I Jakarta: Departemen Sosial, 2009), h.35.

<sup>10</sup>Cahyat, dkk., *Kemiskinan* (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 11.

<sup>11</sup>Butar-Butar Dinar. 2008. *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya dengan Kemiskinan di Pedesaan*. <http://repository.usu.ac.id>. ( 3 Februari 2016).

Pengertian kemiskinan dalam arti yang lebih luas adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga menyebabkan kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain. Setidaknya terdapat tiga bentuk potensi yang dapat diamati dalam rangka memahami potensi keluarga miskin.<sup>12</sup>

Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam peranan sosial. Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS. Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS selama ini menggunakan dua cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin BPS menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang bersifat makro ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase kemiskinan. Meskipun demikian, data ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa digali dan sangat bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, dengan melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 yang kemudian digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung*:2011).h.21

menentukan SDM penerima BLT yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat tinggalnya.<sup>13</sup>

Persoalan kemiskinan bukan merupakan gejala baru yang terjadi di Indonesia, melainkan sudah lama menghinggapinya masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Sulawesi. Dalam buku tentang sejarah ekonomi sosial Indonesia, Soedjatmoko menggambarkan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu pemerintah Belanda mulai meresahkan kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa akibat penambahan jumlah penduduk dan sistem tanam paksa.<sup>14</sup> Disamping itu, masalah kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah material namun juga non material, yang menyangkut kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan masalah kemiskinan diperlukan adanya keterlibatan beberapa pihak yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa seakan-akan kemiskinan hanya bisa di berantas oleh program-program “pemberdayaan” masyarakat dalam arti sempit, Pemberdayaan seolah hanya mencakup pemberian modal usaha untuk membuka warung kecil di sudut kampung, pemberian sapi atau kambing untuk peternakan, dan pelatihan perbengkelan atau kerajinan tangan. Asumsi sederhanya, jika orang-orang miskin di beri modal dan dilatih, mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan. Kehidupan mereka kemudian akan menjadi lebih baik dan tidak miskin lagi. Asumsi ini telah menjadi keyakinan umum dan cenderung dianggap kebenaran mutlak.<sup>15</sup>

Problematika kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara yang sangat banyak terjadi *problem* Kemiskinan.

---

<sup>13</sup>Suheriyanto, *Sosial Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Manusia* (Jakarta:2010). h.15.

<sup>14</sup>Soedjatmoko, *sejarah ekonomi sosial Indonesia* (Semarang:1983).h.25

<sup>15</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesejahteraan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 5.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, orang tua sulit membiayai kesehatan, mereka tidak menabung mereka tidak menabung untuk masa depan anak-anaknya. Keluarga tidak memiliki akses ke pelayanan publik serta tidak memiliki jaminan sosial. Selain itu, kemiskinan memicu arus urbanisasi di kota,serta jutaan anak sulit memenuhi kebutuhan pangan,sandang dan papan.<sup>16</sup> Di Indonesia,masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang relevan untuk terus di kaji.kemiskinan dapat di kategorikan empat kategori yaitu Kemiskinan *absolute,relative,structural and cultural*.penjelasan mengenai kategori kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan *absolute* adalah diakibatkan oleh ketidak mampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,seperti makan pakaian pendidikan kesehatan dan transportasi.
2. Kemiskinan *relative* adalah keadaan miskin yang di alami oleh individu atau kelompok di bandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.Jika Batas Kemiskinan misalnya Rp.100.000 per bulan secara absolut tidak miskin.Jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah 200.000 per orang per bulan,maka secara relative orang tersebut orang miskin.
3. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap,gaya hidup ,nilai atau orientasi sosial budaya seseorang di masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (Masyarakat modern).
4. Kemiskinan *structural* adalah kemiskinan yang di akibatkan oleh ketidak adilan *structural*,baik *struktural* politik,sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Prawoto,*Memahami Permasalahan Sosial*,(Bandung: Alfabeta,2010). h. 57

<sup>17</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, panduan praktik mengkaji masalah dan kebijakan sosial* ,(Bandung:Alfabeta,2010),h.17-18

Menurut Suharto, kemiskinan disebabkan beberapa faktor antara lain seseorang; mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal dan keterampilan dalam berwirausaha, tidak memiliki kesempatan kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak mempunyai jaminan sosial (Pensiun, kesehatan dan kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur terbatas.<sup>18</sup>

#### ***D. Tinjauan Teori Sumber Daya Manusia (SDM)***

##### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>19</sup>

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan

---

<sup>18</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan..*, h.17

<sup>19</sup>Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), h. 48

demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan saling membutuhkan dan saling ketergantungan.<sup>20</sup>

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada dan termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- a. Adaptasi (*Adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*Integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
- d. Pemeliharaan pola (*Latency*): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan, Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem

---

<sup>20</sup>Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: kencana, 2000), h. 67



kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.<sup>21</sup>

Teori struktural fungsional mengansumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.

## **2. Sistem Sosial**

Konsep Talcott Parson tentang sistem sosial dimulai dari level mikro, yaitu interaksi interaksi antara ego dan alter ego, yang diartikan sebagai bentuk dasar dari sistem sosial. Menurut Parsons, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain. Walaupun sistem sosial identik dengan sistem interaksi, namun Parsons menganggap interaksi bukan merupakan hal terpenting dalam sistem sosial, namun ia menempatkan status peran sebagai unit yang mendasari sistem. Status peran merupakan komponen struktural sistem sosial. Status merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam suatu posisi.

---

<sup>21</sup>Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007).h.54

Menurut Parsons, alur pertahanan kedua dalam sistem adalah kontrol sosial. Suatu sistem akan berjalan baik apabila kontrol sosial hanya dijalankan sebagai pendamping, sebab sistem harus mampu menoleransi sejumlah variasi, maupun penyimpangan. Sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan fungsinya. Jumlah individu yang sedikit dan berbagai bentuk penyimpangan dapat terakomodasi, namun bentuk-bentuk lain yang lebih ekstrim harus diakomodasi oleh mekanisme penyeimbang baru. Intinya adalah Parsons ingin menekankan bahwa analisisnya mengacu tentang bagaimana sistem mengontrol aktor, bukan bagaimana aktor menciptakan dan memelihara sistem.<sup>22</sup>

### **3. Sistem Kultural**

Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Contohnya, nilai dan norma akan mendorong individu untuk bertutur kata lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang dituakan.

Parsons berpendapat bahwa sistem kultural sama dengan sistem tindakanyang lain. Jadi, kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sarana orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial. Artinya sistem kultural dapat dikatakan sebagai salah satu pengendali sistem kepribadian

---

<sup>22</sup>Bernard Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.55

#### 4. Sistem Kepribadian

Sistem kepribadian tidak hanya dikendalikan oleh sistem kultural, namun juga dikendalikan oleh sistem sosial. Ini tidak berarti tidak ada tempat independen atau bebas pada sistem kepribadian. Pandangan Parsons adalah kendati konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi. Kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Kritik Parsons tentang kepribadian ialah, dia tidak membiarkan kepribadian sebagai sistem yang tidak independen atau tidak bisa berdiri sendiri dan hanya diatur oleh sistem kultural maupun sistem sosial. Kepribadian adalah sistem motivasi yang ada didalam diri individu yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan disposisi. Kebutuhan ini berbeda bukanlah dorongan naluriah sejak lahir yang dimiliki individu, namun kebutuhan ini timbul karena individu berada dalam setting sosial.

Kebutuhan disposisi akan mendorong individu untuk menerima maupun menolak objek yang ada di lingkungan itu maupun untuk mencari dan menemukan objek yang baru. Dengan kata lain, kebutuhan inilah yang mendorong individu untuk terjebak maupun masuk dalam suatu sistem maupun terciptanya sistem. Parsons membedakan kebutuhan disposisi menjadi tiga jenis, yakni hal yang mendorong aktor untuk mendapatkan cinta, persetujuan, keputusan yang disebabkan dari hubungan sosial mereka. Kedua adalah internalisasi nilai yang mendorong aktor untuk mengamati berbagai standar struktural, dan kemudian menjadi harapan suatu peran untuk memberi maupun mendapatkan respon yang tepat dari hubungan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 31

Sistem harus terstruktur agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan juga harus harmonis dengan sistem lain. Sistem juga harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain, artinya suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi antara satu sistem dengan sistem lainnya akan saling terkait. Sistem juga dituntut untuk mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional (imbang), melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya, Mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, dapat dikendalikan bila terjadi konflik atau menimbulkan kekacauan dan memiliki bahasa dan aktor sosial. persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi internalisasi Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan di internalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari ktor tersebut.

Dari asumsi-asumsi inilah Parson menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Parson sedikit sekali memperhatikan masalah perubahan sosial. Keempat sistim tindakan ini tidak muncul dalam kehidupan nyata tetapi lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata. Proses evolusi dapat berlangsung dengan berbagai macam cara, tidak ada satu pola umum yang mempengaruhi semua masyarakat secara equal. Masyarakat tertentu mungkin mendorong terjadinya evolusi, tetapi masyarakat lain justru tertimpa konflik internal atau menghadapi rintangan lain yang menghalangi atau bahkan memperburuk proses evolusi.

#### ***E. Pandangan Islam tentang Program Keluarga Harapan***

Upaya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan juga merupakan anjuran islam agar menjadi orang bertakwa, karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih dekat kejahatan yang di pengaruhi oleh tipuan

dan godaan setan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:268 :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.<sup>24</sup>”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat sangat mudah dipengaruhi oleh tipuan iblis. Sehingga, cara yang dilakukan oleh orang yang dermawan adalah menolong sesama muslim agar terhindar dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Oleh Karena itu, mengentaskan kemiskinan jadi factor utama yang dilakukan demi kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maun 107:3

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Terjemahnya :

“Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.<sup>25</sup>”

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membantu/memberi makan orang Miskin merupakan salah satu tanda bagi orang yang mendustakan agama. Sehingga, seorang muslim yang taat kepada agamanya senantiasa menolong sesama manusia dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya dalam arti membantu kepada sesama di kala mereka sempit, kesusahan dan keluar dari kemiskinan meningkatkan kesejahteraan.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2010), h 45

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2010), h 602

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam memperoleh data melalui pendekatan lapangan, wawancara dalam suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem. Tujuannya untuk memperoleh analisa data, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan terkait penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) dan masyarakat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan fokus objek yang diteliti adalah sekretaris PKH kota Makassar, pendamping, penerima bantuan PKH dan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan Tamalate, kota Makassar.

#### **3. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan mulai bulan maret tahun 2016 sampai dengan bulan april tahun 2016.

---

<sup>1</sup>Lexy.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosda Karya 2007), h.23

<sup>2</sup> Nurhidayat Muh. Said. *Metode Penelitian dakwah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013) hal.37.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sarasannya. Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan pendekatan multidisipliner. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Ilmu Kesejahteraan Sosial yaitu Mikro, mezzo dan makro. Kemudian Pendekatan sosiologis menurut Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.<sup>3</sup>

Pendekatan sosiologis digunakan karena sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi dan interaksi sosial masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian dalam menelaah program keluarga harapan akan banyak terkait dengan dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan di lapangan sehingga dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis dan Pendekatan *Social Welfare* digunakan untuk menelaah Program keluarga harapan dalam aspek meningkatkan kesejahteraan pembangunan sosial.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang dianggap relevan

---

<sup>3</sup> M. Burhan Bungin, *penelitian kualitatif* (Cet. II ; Jakarta: Kencana Prenada group,2008), h. 115

<sup>4</sup>Husaini Usman Poernomo,*Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.54

dijadikan narasumber, seperti sekretaris PKH kota Makassar, pendamping PKH, penerima bantuan PKH di kecamatan Tamalate kota Makassar untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang dilakukan. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan :

- a. Sekretaris PKH : 1 (satu) orang
- b. Pendamping PKH : 2 (dua) orang
- c. Penerima bantuan PKH : 4 (empat) orang

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan lapangan mengenai Jumlah operator Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate kota Makassar, kajian terhadap artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.

#### **D. *Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## 1. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti<sup>5</sup> Peneliti dalam pengamatannya saat melakukan penelitian di lapangan memperhatikan beberapa hal diantaranya: objek penelitian yaitu pendamping dan penerima bantuan PKH yang diteliti, Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat di kecamatan Tamalate kota Makassar. Adapun pengamatan dalam penelitian salah satunya mengamati aktivitas di kantor PKH di jalan Abdullah dg Sirua No.26

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses Tanya jawab lisan, terdiri dari dua atau lebih bertatap muka secara fisik. Wawancara merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan pulpen dan buku catatan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis ada 7 (tujuh) informan yaitu :

- a. Sekretaris PKH : 1 (satu) orang
- b. Pendamping PKH : 2 (dua) orang
- c. Penerima bantuan PKH : 4 (empat) orang

Tabel 3.1 : Nama-nama informan dalam penelitian

Nama	Umur	Jabatan
La Heru S.Sos.,M.si	44 Tahun	Sekretaris PKH Kota Makassar
Nabahan SE	39 Tahun	Koordinator PKH Kota Makassar
Firman Mustafa SE	29 Tahun	Pendamping PKH Kecamatan
Burhan	39 Tahun	Penerima Bantuan PKH
Herman	29 Tahun	Penerima Bantuan PKH
Linda	31 Tahun	Penerima Bantuan PKH
Hera	29 Tahun	Penerima Bantuan PKH

*Sumber : Diolah tahun 2016 hasil penelitian*

---

<sup>5</sup> Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.136

#### **4.Dokumentasi**

Metode Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, dokumen kecamatan, kamera, buku, gambar, dan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan, seperti profil Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, kecamatan Tamalate dalam angka 2014, rekap data PKH tahun 2016.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa instrumen di lapangan sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian diantaranya; Pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, dan buku catatan.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi objek peneliti, namun juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. Adapun teknik analisis dalam penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yang dimaksud adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang sifatnya masih terkesan belum ilmiah yang bersumber dari catatan tertulis dan hasil rekaman di lapangan. Dengan reduksi ini, pembaca tidak akan mengalami kesulitan sehingga dalam menyimpulkan isi penelitian tidak lebih dan tidak terdapat penafsiran yang salah ( salah tafsir ) dengan penulis.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan**

Dalam tahap ini, penyajian data dilakukan dengan menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Kecamatan Tamalate dan Profil PKH***

##### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di kota Makassar. Kecamatan Tamalate mempunyai batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mamajang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar, sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar, Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gowa.

Ada 3 kelurahan yang terletak di daerah pantai, kelurahan Baromobong, Tanjung Merdeka dan Maccini Sombala. Selanjutnya 7 kelurahan lainnya yang bukan merupakan daerah pantai yaitu, kelurahan Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa'baeng-baeng, Manuruki, Mangasa dan parang Tambung. Kemudian 2 kelurahan yaitu Barombong dan Tanjung Merdeka merupakan daerah perdesaan dan 8 kelurahan lainnya merupakan daerah perkotaan.

Jarak masing-masing kelurahan menuju ibukota kecamatan bervariasi, kelurahan Maccini Sombala dan Balang Baru berjarak antar 1-2 km. Jarak kelurahan Jongasya dan Parang Tambung 3-4 km ke ibukota kecamatan. Sedangkan kelurahan lainnya berjarak antara 5-10 km.<sup>1</sup>

Kecamatan Tamalate terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 20.21 km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km<sup>2</sup>, terluas kedua adalah kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah yang paling kecil adalah

---

<sup>1</sup>Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 2

keluraha Bungaya yaitu 0,29 km<sup>2</sup>. Adapun kondisi topografi setiap daerah di bawah 500 meter di permukaan laut.<sup>2</sup>

Tabel 4.1 : Luas dan ketinggian dari permukaan laut di kecamatan Tamalate

Kelurahan	Luas (Km)
Barombong	7,34
Tanjung Merdeka	3,37
Maccini Sombala	2,04
Balang Baru	1,18
Jongaya	0,51
Bungaya	0,29
Pa'baeng-Baeng	0,53
Manuruki	1,54
Parang Tambung	1,38
Mangasa	2,03
Kecamatan	20,21

*Sumber : Kecamatan Tamalate dalam Angka 2014*

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa kecamatan Tamalate dekat dengan permukaan laut, ada 3 kelurahan dekat dari bibir pantai yaitu kelurahan Maccini Sombala, kelurahan Tanjung Merdeka dan kelurahan Barombong. Ketinggian daratan kecamatan Tamalate cukup rendah rata-rata ketinggian kelurahan di bawah 500 meter dari permukaan laut dan menjadikan kawasan tersebut menjadi sarana wisata yaitu tanjung.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Tamalate**

Visi kecamatan Tamalate kota Makassar adalah terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menunjang visi kota Makassar sebagai KOTA DUNIA.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya yang dimiliki serta di tunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional, maka misi SKPD kecamatan Tamalate adalah :

---

<sup>2</sup> *Kecamatan Tamalate dalam Angka 2014*

- a. Mengkordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa,, pembinaan kerukunaan umat beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pemeberdayaan masyarakat dan pembinaan administrasi kecamatan, serta pembinaan administarasi kependudukan.
- b. Mendorong peningkatan kualitas prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana umum.
- e. Mendorong peningkatan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan.
- f. Mengkordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiba umum serta kemasyarakatan, penerapan, penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### **3. Tugas Pokok Camat**

Camat sebagai kepala SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat bertanggung jawab langsung kepada waikota melalui sekertaris daerah kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut camat melaksanakan fungsi :

- a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkordinasikan prasana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
- g. Mengkordinasikan kegiatan pengolahan kebersihan

---

<sup>3</sup>Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 4

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan
- i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang, milik daerah yang dalam daerah pengusaanya
- j. Pelaksanaan kesekretariatan.<sup>4</sup>

#### **4. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh kesatuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat mempunya fungsi :

- a. Pelaksaaan pengelolaan ketatausahaan
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan
- c. Pelaksanaan pengurusan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan<sup>5</sup>

#### **5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggan kecmatan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian

---

<sup>4</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 5

<sup>5</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 8

- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagai urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan mendistribusikan surat sesuai bidang
- c. Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan
- d. Membuat usulan kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun
- e. Membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian dan ruang lingkup kecamatan
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan
- h. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri
- i. Melakukan koordinasi pada secretariat korpri kota Makassar
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### **6. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja kecamatan
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi kepada Bappeda
- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas
- e. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan
- f. Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan



- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan kerja
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan tugasnya
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- j. Menyusun hasil laporan pelaksanaan tugas.<sup>6</sup>

### **7. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunaan umat beragama , pengkordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan dan penyelenggaran pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan penegakan peraturan walikota serta undang-undang lainnya. Untuk melaksanakan tugas, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunaan antar umat beragama

---

<sup>6</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 11

- g. Menyusun rencana pengkordinasian kegiatan UPTD/ instansi pemerintah kecamatan
- h. Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitas lomba/penilaian kelurahan
- j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan
- k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan
- l. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- m. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
- n. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam ruang lingkup kecamatan
- o. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
- p. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- q. Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- r. Menyusun pelaksanaan laporan tugas secara berskala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasanya<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 14

## **8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kecamatan
- g. Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulus bagi lembaga kemasyarakatan
- h. Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat kecamatan
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- k. Memberikan saran kepada camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- m. Melaksanakan tugas kedinasan yang lainnya berdasarkan perintah atasan<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 16

## **9. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan, serta penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan .

Untuk melaksanakan tugas, seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Mengumpulkan bahan dan dalam rangka fasilitasi dan kontribusi penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan
- f. Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah dan kecamatan
- g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi di daerah wilayah kecamatan
- h. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program perekonomian usaha masyarakat

- j. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan kordinasi penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan
- k. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peran wanita
- l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- m. Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.<sup>9</sup>

#### **10. Seksi Pengelola Kebersihan**

Seksi pengelola kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan, untuk melakukan tugas, seksi kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Menyusun rencana penyelenggaraan pengelola kebersihan di wilayah kecamatan
- f. Menyusun dan mengkordinasikan jadwal pengembalian sampah di kelurahan
- g. Melaksanakan koordinasi dengan dinas pertanian dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan
- h. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

---

<sup>9</sup> Profil, *kecamatan Tamalate kota Makassar Tahun 2014*, h. 18

- i. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan
- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- k. Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

### 11. Kependudukan

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St Fatimah “mengatakan dalam kurun waktu tahun 2013-2014 jumlah penduduk kecamatan Tamalate meningkat setiap tahun. Pada tabel 4.2 tampak bahwa jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 176.947 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.110 jiwa bila di bandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 yang berjumlah 175.837”.<sup>10</sup>

Tabel 4.2 : Jumlah penduduk laki-laki, perempuan, KK, RT, RW dan Wajib KTP

No	Kelurahan	Penduduk			KK	RW	RT	Wajib KTP
		Laki- Laki	Perempu an	L+P				
1	Barombong	5917	6067	11984	2683	12	65	3340
2	Tanjung Merdeka	4495	4560	9055	1894	8	31	5746
3	Maccini Sombala	10118	9729	19847	4470	9	72	11890
4	Balang Baru	8423	8686	17109	3451	10	57	10882
5	Jongaya	7243	7291	14534	3402	14	56	9725
6	Bungaya	4238	4542	8780	1929	12	47	6228
7	Pa'baeng-Baeng	9402	9318	18720	4373	10	38	2097
8	Mannuruki	5976	5824	11800	3120	8	30	8544
9	Parang Tambung	18215	18516	36731	8405	16	109	23437
10	Mangasa	13447	14940	28387	9037	13	58	19197
Jumlah		87474	89473	176947	42764	112	563	105036

Sumber : Kecamatan Tamalate dalam Angka 2014

<sup>10</sup>St.Fatimah (47 Tahun), Kasubag Umum Kecamatan Tamalate, Wawancara, Makassar, 21 Maret 2016.

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan demografi kependudukan meningkat secara drastis dan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, jumlah RW, RT, KK dan wajib KTP cukup banyak terdiri dari 10 kelurahan se-kecamatan Tamalate dan angka tersebut akan bertambah setiap tahunnya dikarenakan dampak bonus demografi.

## **12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan**

Penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan di kecamatan Tamalate dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 :Penduduk menurut agama/aliran kepercayaan di kecamatan Tamalate tahun 2014

Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Barombong	11221	387	81	-	-	-
Tanjung Merdeka	6236	212	44	4	4	-
Maccini Sombala	16975	697	750	37	32	9
Balang Baru	15485	383	289	11	9	20
Jongaya	14532	2956	733	30	20	-
Bungaya	10624	795	67	22	16	33
Pa'baeng-Baeng	17145	794	439	145	145	-
Mannuruki	14160	411	217	-	-	-
Parang Tambung	30101	433	321	-	-	22
Mangasa	24534	487	408	-	-	29
Kecamatan	161013	7554	3350	249	226	114

*Sumber : Kecamatan Tamalate dalam Angka 2014*

Melihat dari tabel 4.3 agama atau kepercayaan yang paling banyak dianut oleh penduduk di kecamatan Tamalate adalah agama Islam dengan jumlah 161.013 orang. Terbanyak kedua adalah agama protestan dengan jumlah penganut 7.554 orang. Agama katolik memiliki jumlah penganut 3.350 orang. Penganut agama hindu berjumlah 249 orang. Jumlah penganut agama budha berjumlah 114 orang. Dan jumlah penganut kepercayaan/agama terkecil adalah agama konghucu dengan jumlah penganut 114 orang.

## **13. Kondisi Pendidikan**

Pada tahun 2013/2014 jumlah fasilitas pendidikan yang ada di kecamatan Tamalate sebanyak 90 buah gedung sekolah. Kecamatan Tamalate memiliki gedung TK sebanyak 25 sekolah dengan jumlah 1.395 orang murid dan 139 orang

guru. Gedung SD/ sederajat baik negeri maupun swasta berjumlah 41 sekolah dengan 12.366 orang murid dan 569 orang guru. Untuk tingkat SMP/ sederajat sebanyak 13 sekolah serta gedung SMA/ sederat sebanyak 11 sekolah. Perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 8.291 orang dan 525 dosen, serta 31.028 jumlah kelulusan. Terdapat kampus Universitas Negeri Makassar yang terletak di Parang Tambung.

Tabel 4.4 : Jumlah Fasilitas Pendidikan di kecamatan Tamalate TA 2013/2014

Kelurahan	TK	SD Negeri	SD Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta
Barombong	1	7	-	1	-	1	-
Tanjung Merdeka	4	4	1	-	1	-	1
Maccini Sombala	2	1	-	-	1	-	-
Balang Baru	1	6	1	-	1	-	3
Jongaya	5	4	2	-	2	-	1
Bungaya	2	2	1	1	1	2	1
Pa'baeng-Baeng	3	4	-	-	1	-	1
Mannuruki	-	2	-	1	-	1	-
Parang Tambung	3	2	-	2	-	-	-
Mangasa	4	4	-	1	-	-	-
Kecamatan	25	36	5	6	7	4	7

Sumber: Kecamatan Tamalate dalam angka 2014

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sarana dan prasarana gedung sekolah kecamatan Tamalate kota Makassar memadai dalam peningkatan kualitas pendidikan memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia sehingga tercapainya pendidikan yang berkualitas dan memutus mata rantai anak putus sekolah, sehingga dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan formal.

#### 14. Profil Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga



harapan berada dibawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah. Program PKH sebenarnya telah di laksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang berfariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah *conditional cash transfer* (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai, yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian, harga BBM.

Peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) membentuk suatu struktur organisasi yang terdiri dari koordinator kab/kota, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensukseskan kebijakan program perlindungan sosial dalam rangka pengetasan kemiskinan.

Tabel 4.5 : Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan(PKH) 2015

No	SDM	Jumlah
1	Koordinator Kab/Kota	1
2	Pendamping	44
3	Operator Kab/Kota	4

Sumber: Profil PKH Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.5 jumlah sumber daya manusia cukup banyak dalam mensukseskan program keluarga harapan, dapat mengoptimaliskan kegiatan dalam memutus mata rantai kemiskinan, memberikan sebuah perubahan dalam aspek pendidikan dan kesehatan, menjalankan regulasi dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten dan kota, menjalankan program dengan maksimal dan mewujudkan hasil yang maksimal dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan kebijakan jaminan sosial dalam bantuan tunai bersyarat atau *conditional cash transfers*.

Tabel 4.6: Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan jumlah bantuan tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah KSM	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2010	11	8.913	6.952.700.000
2	2011	11	8.649	12.577.900.000
3	2012	11	8.424	12.283.030.000
4	2013	12	9.974	16.044.595.000
5	2014	12	9.538	17.083.531.500
6	2015	12	9.466	11.808.677.500
Total				76.750.434.000

Sumber: Profil PKH Tahun 2015 Realisasi hingga tahap II

Berdasarkan 4.6 menunjukkan penurunan jumlah KSM dari tahun 2010 sampai tahun 2012, kemudian tahun 2013 bertambah dikarenakan jumlah kecamatan dari 11 menjadi 12 kecamatan, jumlah bantuan dari tahun 2010 sampai 2015 mencapai 76.750.434.000 rupiah, jumlah bantuan ini akan bertambah ketika tahun 2016 sudah di salurkan bantunya kepada penerima manfaat program keluarga harapan dan keluarga sangat miskin.

## **B. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kualitas SDM**

### **1. Penerapan PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial**

Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang dicetuskan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden keenam periode 2009-2014). Provinsi Sulawesi Selatan menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010. Pada awal program di tetapkan 3 kabupaten diantaranya kota Makassar, kabupaten Gowa, dan kabupaten Bone, ketiga kabupaten/kota tersebut dijadikan sebagai pilot project dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah kota Makassar untuk menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2010 Kebijakan ini tidak lain dalam rangka pemutusan mata rantai kemiskinan yang dimana melihat aspek pendidikan dan kesehatan. Khusus di kota Makassar, Program Keluarga Harapan (PKH) mulai

dilaksanakan pada Bulan Juni 2010 dengan jumlah peserta PKH tervalidasi sejumlah 8.913 Keluarga Sangat Miskin (KSM), kegiatan pendukung pelaksanaannya seperti kegiatan sosialisasi, administrasi dan ATK<sup>11</sup>.

Sebagai bentuk program yang masih baru, program ini didukung oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan PKH tahun 2011, banyak menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi di masyarakat khususnya KSM, implementasi dan bimbingan secara teknis. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat lintas Sektorial diantara kementerian dan instansi daerah/kota, begitu juga yang di ungkapkan Bapak La Heru dalam wawancara mengatakan :

“Program dari sejumlah instansi terkait dana *shareing* BAPPEDA, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi melancarkan kebijakan pusat melalui dinas kota diadakan RAKORNAS pelayanan sosial yang selanjutnya mefasilitasi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kepala keluarga dijamin dengan asuransi kesejahteraan sosial terpadu di mana ibu dan anak penjaminan kesehatan dan pendidikan”<sup>12</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengevaluasi pencapaian tugas dengan mengadakan *event* balita sehat dan anak berprestasi sejauh mana capaian dan manfaat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar, wawancara dengan pak Nabahan SE mengatakan:

“maka dilaksanakan kegiatan penjangkaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pendidikan berprestasi dan balita sehat. Kegiatan tersebut berhasil menjaring ratusan anak miskin peserta PKH yang berprestasi yang berhasil menduduki rangking 10 besar pada tiap kelas baik SD maupun SMP serta balita sehat.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Profil, *Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015*, h 2.

<sup>12</sup> La Heru (44 tahun), Sekretaris Program Keluarga Harapan kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2016

<sup>13</sup> Nabahan (39 tahun), Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

Pendamping PKH kecamatan Tamalate mengungkapkan, “berdasarkan informasi hasil Survey dan Pengukuran yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari Pusat Kajian Universitas Indonesia terhadap peningkatan gizi dan kesehatan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kota Makassar, yang dilaksanakan 2014 – 2015 diperoleh bahwa secara umum derajat kesehatan peserta PKH kota Makassar berkategori baik, demikian pula dengan tingginya semangat untuk mendatangi layanan kesehatan di posyandu dan puskesmas.”<sup>14</sup>

## 2. Dukungan Dana Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dukungan dana PEMDA untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di maksudkan dapat di optimalkan dalam proses jalanya suatu program dan memberikan hasil yang baik dalam hal peningkatan kualitas pengembangan SDM baik dari pendamping maupun penerima bantuan terkhusus dalam aspek pendidikan dan kesehatan, dan memberikan kontribusi dalam pemantapan program, pengembangan dan peningkatan potensi pendampingan.

Tabel 4.7 : Rincian Dana PEMDA dalam Meningkatkan Kualitas SDM

No	Tahun	Jumlah Dana	Penggunaan
1	2010	211.745.000	Sosialisasi, Pengembangan SDM, ATK
2	2011	150.850.000	Sosialisasi, Pengembangan SDM, ATK
3	2012	672.484.000	Peningkatan Potensi RTSM, Gerakan Pencanangan Keluarga Harapan, Kunjungan Kerja, Anugrah Siswa Berprestasi dan Balita Sehat PKH.
4	2013	558.613.700	Peningkatan Potensi RTSM, Gerakan Pencanangan Keluarga Harapan, Kunjungan Kerja
5	2014	162.355.000	Peningkatan Potensi Pendampingan KSM PKH
6	2015	978.474.500	Pengembangan dan Pemantapan PKH, Pembinaan Sosial Pendamping PKH, Peserta PKH berprestasi & Balita Sehat, <i>Launching</i> Kegiatan PKH, dan <i>Study Banding</i>

Sumber: *Profil Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015*

Berdasarkan tabel 4. 7 menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat baik dalam beberapa

<sup>14</sup>Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

kegiatan antara lain, sosialisasi, pengembangan SDM, gerakan pencahangan keluarga harapan, peningkatan potensi rumah tangga sangat miskin dan pembinaan sosial pendamping PKH, peserta PKH berprestasi, balita sehat dan *launching* kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).

### **3. Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan, dukungan masyarakat diberikan dalam berbagai bentuk, terutama terciptanya suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan tujuan PKH, berjalan dengan lancar. Kemudian wawancara dengan pendamping PKH kecamatan Tamalate mengatakan, adapun tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM”<sup>15</sup>

Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sangat Miskin (KSM), sedangkan jangka panjang dengan masyarakat keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya dan balita melakukan imunisasi, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan pasca persalinan bagi ibu nifas dan perbaikan gizi, di harapkan akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

---

<sup>15</sup> Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

#### 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam beberapa Bidang

Peningkatan Kualitas SDM dalam 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sikap/pola pikir (*Mindset*) diuraikan dalam wawancara dengan koordinator PKH kota Makassar bapak Nabahan sebagai berikut :

“Bidang Pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat miskin kecamatan Tamalate kota Makassar untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kesadaran peserta PKH akan pentingnya pendidikan diperlihatkan melalui verifikasi kehadiran siswa di sekolah di atas rata-rata 85 %.

Peningkatan mutu pendidikan siswa peserta PKH kecamatan Tamalate kota Makassar juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peserta PKH yang diterima di sekolah negeri dan sekolah unggulan.

Bidang kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) telah meningkatkan angka partisipasi dan kesadaran masyarakat miskin kecamatan Tamalate kota Makassar untuk mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan yang dahulunya kurang dikunjungi masyarakat, menjadi termanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya kesehatan telah menular kepada masyarakat lingkungan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>16</sup>

Kemudian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ekonomi dan perubahan sikap/pola pikir banyak memberikan kontribusi dalam aspek peningkatan daya beli masyarakat dan meningkatkan perubahan *mindset* sebagai mana yang di ungkapkan bapak Firman Mustafa SE :

“Bidang Ekonomi, melalui pemberian dana bantuan PKH yang lebih dari 12 Milyar pertahun, telah memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat miskin kecamatan Tamalate kota Makassar khususnya peserta PKH. Sejumlah kegiatan ekonomi masyarakat kecamatan Tamalate kota Makassar turut tergerakkan sehingga pada akhirnya berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.

Perubahan Sikap/Pola Pikir, melalui kegiatan pembinaan melalui Pertemuan Kelompok yang rutin dilaksanakan oleh Pendamping PKH kecamatan Tamalate, telah dapat meningkatkan perubahan pola fikir dan sikap untuk melakukan perbaikan status dan perbaikan perekonomian keluarga. Dengan motto: “Anakku Sehat dan Cerdas, yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi motor penggerak

---

<sup>16</sup>Nabahan (39 tahun), Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan kota Makassar, *Wawancara* , Makassar, 28 Maret 2016

bagi kegiatan perubahan tersebut yang pada nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi di kecamatan Tamalate kota Makassar.”<sup>17</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif dan solusi dalam jangka pendek dan panjang memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga fungsi sosialnya dapat berkembang sebagaimana yang di ungkapkan seorang, penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kecamatan Tamalate kota Makassar mengatakan :

“Kehadiran na Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate kota Makassar telah memberi solusi bagi kami dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap usaha pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kami”.<sup>18</sup>

Perubahan pola sikap maupun tingkah laku masyarakat hanya bisa dicapai melalui program pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan sebagaimana yang terdapat pada Program Keluarga Harapan. Komplementaritas peran pendampingan yang telah dicanangkan Kementerian Sosial membuka kesempatan integritas dan implementasi program multi sektoral, sehingga percepatan langkah untuk mencapai tujuan akan dapat dicapai.

### ***C.Kendala yang dihadapi PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***

Kendala yang di hadapi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ketika ada peserta yang kurang mengoptimalkan bantuan yang di berikan oleh program keluarga harapan agar dapat memutus mata rantai kemiskinan dan dapat memperbaiki diri agar keberfungsian sosialnya meningkat, kendala dalam proses pelayanan, wawancara

---

<sup>17</sup> Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>18</sup> Herman (29 tahun), Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan, *Wawancara* , Makassar, 2 April 2016.

yang dilakukan kepada pendamping PKH kecamatan Tamalate, Bapak firman Mustafa mengatakan:

“Pelayanan yang belum terlalu efektif di harapkan dapat selalu menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelayanan terutama untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga sangat miskin. Apabila terjadi permasalahan, maka penyedia pelayanan perlu segera mengupayakan penyelesaiannya dengan pihak-pihak terkait. Seperti, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan (sekolah, puskesmas, dan jaringannya) akan dikunjungi oleh pendamping minimal 2 kali tiap bulannya.<sup>19</sup>

Pada kesempatan tersebut pihak penyedia pelayanan dapat mengungkapkan permasalahannya yang ada, baik terkait tugas dan fungsinya dalam pemberian layanan kepada peserta PKH. Apabila masalah tidak dapat terselesaikan ditingkat penanganan terdekat, pendamping dapat memberikan formulir pengaduan kepada penyedia layanan dan menjelaskan cara penyampaian pengaduan kepada UPPKH-Kabupaten/Kota atau UPPKH-Pusat melalui berbagai cara penyampaian pengaduan terkait<sup>20</sup>

Pengaduan kewenangan, yang penanganannya di UPPKH-Kabupaten/Kota seperti antara lain:

1. Permasalahan terkait data peserta PKH
2. Permasalahan terkait data pemenuhan komitmen dan verifikasi
3. Permasalahan terkait pelayanan UPPKH daerah (Kabupaten/Kota dan kecamatan termasuk vasilitator dan UPM), kantor pos dan penyediaan pelayanan yaitu sekolah dan puskesmas
4. Permasalahan pembayaran (keterlambatan, antrian yang panjang, perubahan jumlah bantuan dan sebagainya)

---

<sup>19</sup>Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>20</sup>Toto Utomo Budi Santoso, *Sistem Pengaduan masyarakat PKH* (Edisi V, Jakarta: Departemen Sosial, 2009), h.3



5. Permasalahan terkait kesediaan layanan di sekolah, puskesmas dan jaringannya
6. Adanya penyimpangan/indikasi/korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan PKH
7. Hal-hal lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PKH.

Jenis pengaduan yang perlu penanganan UPPKH pusat antara lain adalah:

1. Permasalahan ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah
2. Permasalahan terkait data peserta, verifikasi, dan pembayaran yang memerlukan perubahan pada master data base di pusat
3. Permasalahan terkait berbagai mekanisme dan prosedur yang dapat memberikan dampak negative terhadap pelaksanaan program
4. Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme skala besar
5. Permasalahan yang melibatkan pemerintah daerah (seperti antara lain: penggunaan dana untuk kepentingan politik dan sebagainya.)
6. Permasalahan lain yang kiranya dapat berdampak pada ketidak kuasaan masyarakat luas.<sup>21</sup>

Hal pengaduan kewenangan sangat membantu para warga masyarakat dalam mendapatkan hak dan kewajiban memberikan penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate kota Makassar sebagai mana yang diuraikan oleh koordinator pendamping PKH kecamatan Tamalate mengatakan :

“Penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate kota Makassar ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus

---

<sup>21</sup> Toto Utomo Budi Santoso, *Sistem Pengaduan masyarakat PKH* (Edisi V, Jakarta: Departemen Sosial, 2009), h.5

anak pada keluarga yang bersangkutan (nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.<sup>22</sup>

***D. Upaya yang dilakukan PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***

Upaya yang dilakukan PKH dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang ada dan tindakan yang diperlukan serta menyelesaikan masalah yang muncul pada tingkat penanganan terdekat, wawancara dengan bapak La Heru sebagai sekretaris Program Keluarga Harapan (PKH) kota Makassar menjelaskan :

“Upaya buat pendamping adakan pelayanan rapat kerja nasional setiap bulan, buat Keluarga Sangat Miskin (KSM) tentu mengadakan pertemuan kelompok bersama pendamping untuk menggali potensi yang ada tiap minggu dan tiap saat dan tindak lanjuti pada rapat kerja tingkat kota Makassar, upaya peningkatan SDM dalam bentuk usaha keterampilan dilakukan di hotel para narasumber para ahli atau tenaga ahli mensalurkan informasi meningkatkan usaha mereka.”<sup>23</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) kesehatan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat miskin, PKH kesehatan menjanjikan aksesibilitas rumah tangga sangat miskin dalam pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, kesuksesan program pemerintah provinsi yaitu kesehatan gratis ditambahkan dalam wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kecamatan Tamalate, bapak Firman Mustafa menjelaskan:

“upaya yang dilakukan PKH dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan perbaikan status kesehatan ibu dan anak khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan ini, PKH kesehatan memberikan stimulan berupa bantuan tunai kepada peserta PKH jika anggota keluarga tersebut Seperti :

---

<sup>22</sup> Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>23</sup> La Heru (44 tahun), Sekretaris Program Keluarga Harapan Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2016

ibu hamil, ibu nifas dan anak usia 0 sampai 6 tahun, memanfaatkan pelayanan kesehatan.”<sup>24</sup>

Meskipun berbagai upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sudah diluncurkan, harus ditingkatkan sehingga pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa di optimalkan dalam status kesehatan ibu hamil dan anak.

Meskipun berbagai strategi peningkatan akses terhadap sekolah kini telah tersedia seperti : Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa miskin dan lain-lain sebagainya tetapi angka partisipasi sekolah khusus bagi anak-anak masyarakat sangat miskin masih belum optimal. Dengan demikian, PKH pendidikan menjanjikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak masyarakat sangat miskin dalam mengakses pelayanan pendidikan<sup>25</sup>

Upaya yang dilakukan PKH untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku/pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar anak tersebut dapat mengakses pelayanan pendidikan.

Wawancara dengan penerima manfaat bantuan PKH, bapak Burhan  
Mengatakan :

“Karena dengan adanya bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH), anak kami dapat bersekolah, mendapatkan tas, buku tulis dan buku pelajaran, kami peserta PKH khususnya anak kami akan lebih mudah mencapai akses pelayanan pendidikan yang tersedia dalam mencapai cita-citanya dan agar kelak mejadi manusia sukses.”<sup>26</sup>

Adapun usaha yang dilakukan PKH dalam meningkatkan partisipasi pendidikan khususnya bagi anak-anak masyarakat sangat miskin, serta untuk mengurangi angka pekerja anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH

---

<sup>24</sup>Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>25</sup>Profil, *Program Keluarga Harapan Tahun 2015*, h. 8.

<sup>26</sup>Burhan (39 tahun), Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan, *Wawancara*, Makassar, 2 April 2016

Pendidikan berupaya memotivasi masyarakat sangat miskin agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. Wawancara dengan sekretaris PKH kota Makassar, bapak La Heru mengatakan :

“Bahwa upaya pengembangan potensi diri perlu ditunjang oleh pendidikan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) juga bertujuan dalam meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi anak hingga lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan wajib sekolah 9 tahun. Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak mereka sekolah di SD/MI terdekat dan melanjutkan hingga SMP, adanya dana PKH diharapkan mampu membantu biaya operasional RTSM terkait pembayaran SPP atau peralatan penunjang sekolah (buku, baju sekolah, dan alat tulis).”<sup>27</sup>

Tabel 4.8 Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

kecamatan Tamalate

Tahap 2016

Kelurahan	SD	SMP	SMA	BUMIL	BALITA	Pra Sekolah
Balang Baru	269	99	38	8	126	1
Barombong	540	268	131	10	370	2
Bongaya	73	27	24	1	36	5
Jongaya	149	45	20	4	60	0
Maccini sombala	353	131	50	13	146	0
Mangasa	241	75	23	13	146	1
Manuruki	27	10	3	1	19	0
Pa'baeng-baeng	265	112	71	8	172	16
Parang Tambung	333	154	43	13	155	1
Tanjung merdeka	134	43	24	4	64	0
Grand Total	2384	964	427	75	1294	26

Sumber: Profil data Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016

Dari data jumlah peserta PKH tahap 2016 Kondisi ini kemudian mencerminkan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ibu hamil, balita melalui Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan akses dan kemudahan masyarakat dalam menyekolahkan anak mereka demi mencapai SDM berkualitas.

<sup>27</sup>La Heru (44 tahun), Sekretaris Program Keluarga Harapan Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 27 Maret 2016.

### **E. Pembahasan**

#### **1. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sebagai bentuk program yang masih baru, program ini didukung oleh Pemerintah kota Makassar berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2011, banyak menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi di masyarakat khususnya Keluarga Sangat Miskin (KSM), implementasi dan bimbingan secara teknis. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat lintas Sektorial diantara kementerian dan instansi daerah/kota, begitu juga yang di ungkapkan bapak La Heru dalam wawancara mengatakan :

“Program dari sejumlah instansi terkait dana *shareing* BAPPEDA, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi melancarkan kebijakan pusat melalui dinas kota diadakan RAKORNAS pelayanan sosial yang selanjutnya mefasilitasi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kepala keluarga dijamin dengan asuransi kesejahteraan sosial terpadu di mana ibu dan anak penjaminan kesehatan dan pendidikan”<sup>28</sup>

Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model

---

<sup>28</sup>La Heru (44 tahun), Sekretaris Program Keluarga Harapan kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2016

perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tamalate Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan, dukungan masyarakat diberikan dalam berbagai bentuk, terutama terciptanya suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan tujuan PKH, berjalan dengan lancar. Kemudian wawancara dengan pendamping PKH kecamatan Tamalate mengatakan, adapun tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM”<sup>30</sup>

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi permasalahan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan saling membutuhkan dan saling ketergantungan.<sup>31</sup>

Perubahan pola sikap maupun tingkah laku masyarakat hanya bisa dicapai melalui program pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan sebagaimana yang terdapat pada Program Keluarga Harapan (PKH). Komplementaritas peran pendampingan yang telah dicanangkan Kementerian

---

<sup>29</sup>Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), h. 48

<sup>30</sup>Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>31</sup>Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 67

Sosial membuka kesempatan integritas dan implementasi program multi sektoral, sehingga percepatan langkah untuk mencapai tujuan akan dapat dicapai.

Teori struktural fungsional mengansumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.<sup>32</sup>

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada dan termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- a. Adaptasi (*Adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikandan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*Integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

---

<sup>32</sup>Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007).h.56

- d. Pemeliharaan pola (*Latency*): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

## **2. Kendala yang dihadapi PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kendala yang di hadapi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ketika ada peserta yang kurang mengoptimalkan bantuan yang di berikan oleh program keluarga harapan agar dapat memutus mata rantai kemiskinan dan dapat memperbaiki diri agar keberfungsian sosialnya meningkat, kendala dalam proses pelayanan, wawancara yang dilakukan kepada pendamping PKH kecamatan Tamalate, Bapak firman Mustafa mengatakan:

“Pelayanan yang belum terlalu efektif di harapkan dapat selalu menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelayanan terutama untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga sangat miskin. Apabila terjadi permasalahan, maka penyedia pelayanan perlu segera mengupayakan penyelesaiannya dengan pihak-pihak terkait. Seperti, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan (sekolah, puskesmas, dan jaringannya) akan dikunjungi oleh pendamping minimal 2 kali tiap bulannya.<sup>33</sup>

Dalam prespektif fungsionalis ini suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Sebagai para juru bicara yang terkemuka, setiapkelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terusmenerus, karena hal itu fungsional.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Firman Mustafa (29 tahun), Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan Tamalate, Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Maret 2016

<sup>34</sup>Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: kencana, 2000) h. 77



### 3. Upaya yang dilakukan PKH dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan PKH dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang ada dan tindakan yang diperlukan serta menyelesaikan masalah yang muncul pada tingkat penanganan terdekat, wawancara dengan bapak La Heru sebagai sekretaris Program Keluarga Harapan (PKH) kota Makassar menjelaskan :

“Upaya buat pendamping adakan pelayanan rapat kerja nasional setiap bulan, buat Keluarga Sangat Miskin (KSM) tentu mengadakan pertemuan kelompok bersama pendamping untuk menggali potensi yang ada tiap minggu dan tiap saat dan tindak lanjuti pada rapat kerja tingkat kota Makassar, upaya peningkatan SDM dalam bentuk usaha keterampilan dilakukan di hotel para narasumber para ahli atau tenaga ahli mensalurkan informasi meningkatkan usaha mereka.”<sup>35</sup>

Sistem organisasi dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan, Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.<sup>36</sup>

Upaya yang dilakukan PKH untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku/pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar anak tersebut dapat mengakses pelayanan pendidikan.

---

<sup>35</sup> La Heru (44 tahun), Sekretaris Program Keluarga Harapan Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2016

<sup>36</sup> Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007).h.54

Klasifikasi sumber daya manusia dalam tingkat hasil penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) aspek kualitas penerima bantuan program, dalam peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), memberikan dampak positif bagi kelancaran program, adapun beberapa klasifikasi usaha yaitu :

- a. Penjahitan
- b. Usaha bengkel
- c. Abon ikan
- d. Warung sembako

Upaya yang dilakukan PKH untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku/pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar dapat berwirausaha memaksimalkan modal yang di berikan oleh pemerintah, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga, adapun peningkatan kualitas dalam bidang kesehatan, sebagaimana yang di uraikan ibu Linda yaitu :

“upaya yang dilakukan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan perbaikan status kesehatan ibu dan anak khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan ini, PKH kesehatan memberikan stimulan berupa bantuan pelayanan kesehatan gratis kepada peserta PKH jika anggota keluarga tersebut Seperti, ibu hamil, ibu nifas dan anak usia 0 sampai 6 tahun, memanfaatkan pelayanan kesehatan.<sup>37</sup>

Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Linda (31 tahun), Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan, Wawancara , Makassar, 2 April 2016

<sup>38</sup>Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007),h. 49

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan digulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah membuka kesadaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) di kecamatan Tamalate bahwa miskin itu tidak baik. Kesadaran para KSM terbukti dengan selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. PKH pendidikan memberikan dampak besar dalam akses dan tingkat kehadiran anak-anak dari KSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak-anak di sekolah melalui verifikasi absen yang telah dilakukan oleh guru masing-masing sekolah.
2. Pendamping selalu mengadakan kegiatan rutin kepada penerima manfaat bantuan PKH. Pendamping selalu menanamkan pemahaman tentang manfaat PKH dan mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak KSM yang dapat meningkatkan kualitas SDM.
3. Peserta atau penerima manfaat bantuan PKH adalah ibu hamil/nifas, balita dan anak usia pendidikan wajib belajar. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk penerima manfaat PKH adalah bantuan langsung tunai bersyarat , artinya penerima manfaat bantuan PKH harus memenuhi kewajiban yang ada dalam ketentuan PKH, seperti membawa ibu hamil/nifas dan balita ke

tempat pelayanan kesehatan, serta menyekolahkan anak di lembaga pendidikan.

4. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah terkhusus kementerian sosial dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mengakses pelayanan pada komponen kesehatan dan pendidikan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan dari uraian kesimpulan hasil penelitian mengenai penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maka implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Harapan kepada pemerintah, agar PKH ini kedepannya dapat menambah bantuan dan melanjutkan kejenjang SMA bahkan kejenjang perguruan tinggi tidak hanya sebatas SMP, karena biaya pendidikan semakin besar dan beban Keluarga Sangat Miskin (KSM) dapat diminimalisir. Sebagaimana hal ini di harapkan sebagian besar responden.
2. Dengan berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) ke depannya, maka diharapkan kepada pemerintah khususnya kementerian sosial menambah pendamping dan operator agar mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Departemen Agama RI*. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2010
- Ali, Abdullah, Sosiologi Pendidikan dan Dakwah, STAIN Press Cirebon bekerjasama dengan Penerbit Cakrawala Yogyakarta, 2007
- Andi, Z.A Dulung, *Sistem Pengaduan Masyarakat PKH* Cet, Jakarta; Mega CitraPustaka,2011
- Aji, Wisnu, Analisis Program keluarga Harapan Terhadap Masyarakat kurang mampu. <http://www.skripsi.com>. (4 Februari 2016)
- Basir, Barthos, *Manajemen Sumber Daya manusia* Jakarta:Bumi Aksara,2004
- Bungin, M. Burhan, *penelitian kualitatif* Cet. II ; Jakarta: Kencana Prenada group, 2008
- Butar-Butar Dinar. 2008. *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya dengan Kemiskinan di Pedesaan*. <http://repository.usu.ac.id>. ( 3 Februari 2016).
- Chamsyah,Bachtiar dan Nuryana,Mu'mang , *Dimensi Religi dalam kesejahteraan Sosial* Cet. I, Jakarta : Balatbang Depsos, 2003
- Elizabeth, K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Grathoff, Richard Kesesuaianantara Alfred Schutzdan Talcott Parsons:*Teori Aksi Sosial*, Jakarta: kencana, 2000
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2010. Mari Kita Mengenal Program PKH. <http://www.depsos.go.id> ( 3 Februari 2016).
- Moleong,Lexy.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya, 2007
- Poernomo, Husaini Usman .*Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta:Bumi Aksara, 1996
- Ritzer, George Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana, 2010
- Rusli, Wahid, Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat Edisi III,Jakarta: Departemen Sosial, 2008
- Said, Nurhidayat Muh. *Metode Penelitian dakwah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Santoso, Toto Utomo Budi,*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* Edisi V,Jakarta:departemen Sosial, 2009

- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* Cet II, Yogyakarta: pustaka belajar, 2001
- Sulistiyono, Budi dan Ninok Laksono, *“Milenium Development Goals”*, Jakarta: pustaka belajar, 2010
- Suharto, Edi *Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung*, 2011
- , *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2009
- , *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktik mengkaji masalah dan kebijakan sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Syahrudin, “Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial”, *Blog Syahrudin* <http://syahrudin.com/2013/03/30> (1 Februari 2016)
- Syukri, Muhammad dan Widjajanti Isdjioso, Direktorat Jaminan Kesehatan Sosial *“PKH dan Dinamika Relasi Gender*. Artikel, Jakarta, Edisi 2010, Vol 12
- Wibowo, Andi *Analisis Program keluarga Harapan Terhadap masyarakat kurang mampu*. <http://Skripsi.com>. (28 Januari 2016).

## **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Makmur Priyanto
2. Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
:Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan  
Tamalate kota Makassar
4. Alamat : Kumala II Lorong III No 15/17

Peneliti tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan:

1. Nama : La Heru S.Sos.,M.Si
2. Umur : 44 Tahun
3. Di wawancarai sebagai :Sekretaris/ Kasi Jaminan Sosial
4. Tanggal wawancara : April 2016

Untuk keperluan penyusunan penelitian.

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, April 2016

Peneliti,

Informan

Makmur Priyanto

La Heru S.Sos.,M.Si

## **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Makmur Priyanto
2. Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
:Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan  
Tamalate kota Makassar
4. Alamat : Kumala II Lorong III No 15/17

Peneliti tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan:

1. Nama : Firman Mustafa SE
2. Umur : 29 Tahun
3. Di wawancarai sebagai : Pendamping PKH Kecamatan Tamalate
4. Tanggal wawancara : 28 Maret 2016

Untuk keperluan penyusunan penelitian.

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 28 Maret 2016

Peneliti,

Informan

Makmur Priyanto

Firman Mustafa SE



## **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Makmur Priyanto
2. Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
:Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan  
Tamalate kota Makassar
4. Alamat : Kumala II Lorong III No 15/17

Peneliti tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan:

1. Nama : Nabahan SE
2. Umur : 39 Tahun
3. Di wawancarai sebagai :Koordinator Pendamping PKH Kota Makassar
4. Tanggal wawancara : 28 Maret 2016

Untuk keperluan penyusunan penelitian.

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 28 Maret 2016

Peneliti,

Informan

Makmur Priyanto

Nabahan SE

## **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Makmur Priyanto
2. Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
:Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan  
Tamalate kota Makassar
4. Alamat : Kumala II Lorong III No 15/17

Peneliti tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan:

1. Nama : Herman
2. Umur : 29 Tahun
3. Di wawancarai sebagai :Penerima manfaat bantuan PKH
4. Tanggal wawancara : 2 April 2016

Untuk keperluan penyusunan penelitian.

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 2 April 2016

Peneliti,

Informan

Makmur Priyanto

Herman

## **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Makmur Priyanto
2. Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
:Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan  
Tamalate kota Makassar
4. Alamat : Kumala II Lorong III No 15/17

Peneliti tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan:

1. Nama : Burhan
2. Umur : 39 Tahun
3. Di wawancarai sebagai :Penerima manfaat bantuan PKH
4. Tanggal wawancara : 2 April 2016

Untuk keperluan penyusunan penelitian.

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 2 April 2016

Peneliti,

Informan

Makmur Priyanto

Burhan

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

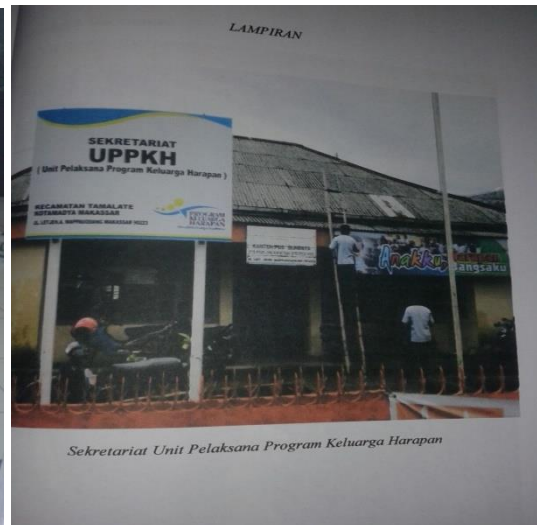
**R**

**A**

**N**



Wawancara dengan sekretaris PKH kota Makassar, La Heru S.Sos.,M.Si



Wawancara dengan koordinator UPPKH Kota Makassar, Nabahan SE  
Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)



Wawancara dengan pendamping PKH kecamatan Tamalate



Wawancara dengan penerima bantuan PKH kecamatan Tamalate





Kegiatan pengembangan dan pemantapan RTSM keluarga harapan di hotel Ramayana,tanggal 13 April 2016 pukul 09.00-16.00



Peserta penerima bantuan PKH se-kota Makassar mengikuti kegiatan pengembangan dan pemantapan RTSM keluarga harapan di hotel Ramayana,tanggal 13 April 2016 pukul 09.00-16.00

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **“Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”**

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data tentang Penerapan Program Keluarga Harapan, bagaimana Program, kendala dan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir:
3. Pendidikan terakhir:
4. Alamat:
5. Jabatan :
6. Agama:

#### **B. Pertanyaan penulis**

1. Latar belakang kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)
  - a. Bagaimana konsep kebijakan PKH ?
  - b. Apa tujuan dari Program Keluarga Harapan ?
  - c. Apa saja program maupun kegiatan yang dilaksanakan pendamping PKH ?
  - d. Berapa jumlah penerima manfaat PKH ?



e. Menurut anda, apakah program keluarga harapan?

2. Upaya keberhasilan PKH dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia

a. Apa saja tugas pendamping PKH ?

b. Apa motivasi anda sebagai pendamping

c. Motivasi, apa yang mendorong anda dapat meningkatkan prestasi anak KSM di sekolah ?

d. Manfaat apa yang anda dapat rasakan setelah menjadi penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ?

3. Kendala dan pendukung program keluarga harapan ?

a. Apa kendala yang anda temukan saat mengikuti PKH ?

b. Apa faktor pendukung program keluarga harapan ?

c. Apakah pendamping PKH membantu anda, dalam proses pemuktahiran data ?

d. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan sebagai operasional pelaksanaan PKH ?

## **RIWAYAT HIDUP**



Makmur Priyanto, lahir di Ujung Pandang/Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 17 April 1994. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Abd.Majid Dg Kulle dengan Syamsia Dg Maning. Penulis memulai pendidikan formal di TK Bhayangkara brimob Pa'baeng-baeng pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2000 kemudian pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Labuang baji II kota Makassar dan lulus pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 18 Makassar dan lulus pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan SMA Negeri 8 Makassar dan lulus pada tahun 2012, kemudian Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar sampai pada tahun 2016.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis perna aktif di lembaga kemahasiswaan yang bersifat ekstra kampus. Penulis menggeluti organisasi ekstra menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2013. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tahun 2013 dan UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UINAM tahun 2013 dan pada tahun 2014 penulis juga bergabung menjadi anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kompi UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2014 menjadi anggota seksi publikasi dan dokumentasi Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa (LPPM) dan menjadi pengurus pada tahun 2015 Pusat Informasi Konseling (PIK) Mahasiswa “Sipakainga” Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.